

**TAHUN
2023**



RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TA 2023



**SEKRETARIAT
DPRD
KAB. KEP SELAYAR**

Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Benteng
Telp. (0414) 21714 No. Faks. (0414) 21097
Kab. Kepulauan Selayar 92812

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenan-NYA sehingga Rencana Kerja Sekretariat Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2023 ini, tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang

Sekretaris DPRD

Kab. Kepulauan Selayar,



MASDAR J PRATAMA, S.Kom

Pangkat : Pembina Tingkat 1

NIP. 198406022010011012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2023	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Sampai dengan Triwulan Kedua 2023.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	27
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar	23
Tabel 3.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja adalah perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan pada skala Pembangunan Daerah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan: Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPDRencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat

Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan Penyusunan Perubahan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Akhir RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah yang menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 memperhatikan program prioritas dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2023 yang isinya telah dijabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Renja Sekretariat DPRD ikut berpartisipasi dalam mendukung misi pertama Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yakni ***“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”*** sesuai dengan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap Anggota DPRD. Selain itu, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD
2. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan Peran fungsi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Untuk mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan dan alokasi anggaran .
3. Agar seluruh program dan kegiatan yang tersusun tepat sasaran

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2023

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Sampai dengan Triwulan Kedua
2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Bab IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2023

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Sampai Dengan Triwulan Kedua

Hasil dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yakni menilai tingkat keberhasilan kinerja dan melihat faktor-faktor yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan Tahun Anggaran berikutnya. Tolak ukur dari penilaian kinerja dalam pelaksanaan evaluasi adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD memiliki empat fungsi yang meliputi: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi diatas, maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2021 s/d 2026 adalah Mewujudkan Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD, kemudian dari tujuan diatas maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan sekretariat DPRD
2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan

Untuk mewujudkan sasaran diatas pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 program dan 17 kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan kepmendagri No.050-3708 tahun 2020.

Dana yang tersedia pada Seckretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun dianggarkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar yang dialokasikan melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jumlah dana dalam APBD Tahun 2023 dengan Pagu Indikatif Pokok sebesar Rp. 28.988.246.117,00 dan Pagu Indikatif setelah perubahan sebesar Rp.31.805.206.251,00. Realisasi anggaran TA 2023 hingga Trwulan kedua sebesar Rp 16.913.770.645 atau 58,35 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.074.475.472,00 atau 41,65%%.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar hingga Triwulan ke dua TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023			
										I		II										III	IV	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13=9+10+11+12		14=7+13			15=14/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	A Predikat	98.366.742.557	B Predikat	0	B Predikat	16.672.152.317														
				Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai Predikat		Sesuai Predikat		Sesuai Predikat															
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	72,00 %	98.366.742.557	0,00 %	0	70,28 %	16.672.152.317														
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	95,00 %		0,00 %		85,00 %															
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan,pengagggaran,evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	100,00%	1.696.643.530	0,00	0	100,00%	174.343.000	23,57%	12.583.000	9,29%	40.852.000		32,86 %	53.435.000	7,29%	53.435.000	7,29%	3,15%	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	455.000.000	0	0	5	47.244.000	2	0	2	27.890.000			4	27.890.000	4	27.890.000	16,00 %	6,13%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai

		4.02.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	85.000.000	0	0	1	11.000.000	0	3.000.000	0	2.826.000				0	5.826.000	0	5.826.000	0,00%	6,85%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	85.000.000	0	0	1	11.000.000	0	0	0	3.750.000				0	3.750.000	0	3.750.000	0,00%	4,41%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	70.000.000	0	0	1	8.000.000	0	3.120.000	0	600.000				0	3.720.000	0	3.720.000	0,00%	5,31%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	70.000.000	0	0	1	8.000.000	0	0	0	2.700.000				0	2.700.000	0	2.700.000	0,00%	3,86%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60	428.811.085	0	0	12	58.587.000	3	2.126.000	3	3.086.000				6	5.212.000	6	5.212.000	10,00 %	1,22%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	502.832.445	0	0	1	30.512.000	1	4.337.000	0	0				1	4.337.000	1	4.337.000	25,00 %	0,86%	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai

		4.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan yang di selesaikan Tepat waktu	100,00%	11.360.454.900	0,00	0	99,00%	2.107.406.452	67,86%	374.594.435	10,71 %	838.292.079				78,57 %	1.212.886.514	15,71 %	1.212.886.514	15,87 %	10,68 %	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	130	10.303.188.900	0	0	26	2.020.804.452	26	365.035.435	0	810.352.079				26	1.175.387.514	26	1.175.387.514	20,00 %	11,41 %	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
		4.02.0 1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	25.000.000	0	0	1	5.000.000	1	1.003.000	0	1.375.000				1	2.378.000	1	2.378.000	20,00 %	9,51%	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
		4.02.0 1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60	310.650.000	0	0	12	23.000.000	3	3.156.000	3	9.385.000				6	12.541.000	6	12.541.000	10,00 %	4,04%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60	244.450.000	0	0	12	20.090.000	3	5.400.000	3	5.619.000				6	11.019.000	6	11.019.000	10,00 %	4,51%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	60.000.000	0	0	1	8.660.000	1	0	0	2.960.000				1	2.960.000	1	2.960.000	20,00 %	4,93%	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
		4.02.0 1.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	229.350.000	0	0	1	16.998.000	1	0	0	3.622.000				1	3.622.000	1	3.622.000	20,00 %	1,58%	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai

		4.02.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	60	187.816.000	0	0	12	12.854.000	3	0	3	4.979.000				6	4.979.000	6	4.979.000	10,00 %	2,65%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	269.550.000	0,00	0	100,00%	14.910.000	33,33%	0	33,33 %	6.295.000				66,67 %	6.295.000	40,00 %	6.295.000	40,00 %	2,34%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.0 1.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah SKPD (Dokumen)	2	25.000.000	0	0	2	3.500.000	1	0	1	2.695.000				2	2.695.000	2	2.695.000	100,00 %	10,78 %	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
		4.02.0 1.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60	194.550.000	0	0	12	6.410.000	3	0	3	3.600.000				6	3.600.000	6	3.600.000	10,00 %	1,85%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD (Laporan)	60	50.000.000	0	0	12	5.000.000	3	0	3	0				6	0	6	0	10,00 %	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik	100,00%	2.073.970.938	0,00	0	100,00%	360.000.000	24,57%	58.948.540	26,29 %	96.285.200				50,86 %	155.233.740	10,17 %	155.233.740	10,17 %	7,48%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.0 1.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60	140.000.000	0	0	12	10.000.000	3	0	3	1.275.000				6	1.275.000	6	1.275.000	10,00 %	0,91%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	145	1.933.970.938	0	0	29	350.000.000	7	58.948.540	8	95.010.200				15	153.958.740	15	153.958.740	10,34 %	7,96%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai

				Peraturan Perundang-Undangan (Orang)																					
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	3.437.025.529	0,00	0	100,00%	636.921.000	23,47%	236.669.000	42,92 %	239.936.000				66,39 %	476.605.000	13,28 %	476.605.000	13,28 %	13,87 %	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	76.550.000	0	0	20	15.310.000	0	0	12	7.060.000				12	7.060.000	12	7.060.000	12,00 %	9,22%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan (Paket)	200	243.127.775	0	0	40	34.000.000	12	7.050.000	18	14.314.000				30	21.364.000	30	21.364.000	15,00 %	8,79%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60	282.500.000	0	0	12	35.190.000	3	3.600.000	3	8.420.000				6	12.020.000	6	12.020.000	10,00 %	4,25%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	180	2.834.847.754	0	0	36	552.421.000	14	226.019.000	15	210.142.000				29	436.161.000	29	436.161.000	16,11 %	15,39 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perssentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100,00%	464.376.250	0,00	0	100,00%	92.674.000	53,85%	54.800.000	15,38 %	33.622.000				69,23 %	88.422.000	17,31 %	88.422.000	17,31 %	19,04 %	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangDisediakan (Unit)	52	464.376.250	0	0	13	92.674.000	7	54.800.000	2	33.622.000				9	88.422.000	9	88.422.000	17,31 %	19,04 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	2.822.805.409	0,00	0	100,00%	592.801.000	25,00%	59.821.596	25,00 %	223.453.155				50,00 %	283.274.751	10,00 %	283.274.751	10,00 %	10,04 %	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan)	60	82.884.469	0	0	12	11.400.000	3	0	3	1.300.000				6	1.300.000	6	1.300.000	10,00 %	1,57%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	60	1.406.801.619	0	0	12	304.578.000	3	58.525.596	3	72.758.811				6	131.284.407	6	131.284.407	10,00 %	9,33%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai

[illegible]

		4.02.0 1.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	125	71.607.118.912	0	0	25	11.872.968.865	25	2.752.312.916	0	2.397.879.292				25	5.150.192.208	25	5.150.192.208	20,00 %	7,19%	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
		4.02.0 1.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	575	2.703.220.000	0	0	100	133.852.000	0	22.312.000	100	102.500.000				100	124.812.000	100	124.812.000	17,39 %	4,62%	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
		4.02.0 1.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100,00%	343.892.981	0,00	0	100,00%	34.993.000	6,25%	1.629.000	18,75 %	1.958.000				25,00 %	3.587.000	4,00%	3.587.000	4,00%	1,04%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.0 1.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	60	144.915.000	0	0	12	16.983.000	0	0	0	0				0	0	0	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 1.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	50	198.977.981	0	0	8	18.010.000	1	1.629.000	3	1.958.000				4	3.587.000	4	3.587.000	8,00%	1,80%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
2	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan			Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100 %	73.964.581.018	100 %	0	100 %	12.316.093.800															
				Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	85 %		65 %		70 %																
		4.02.0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Tintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	100,00 %	73.964.581.018	0,00 %	0	100,00 %	12.316.093.800															

		4.02.0 2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pembahasan Perda	100,00%	16.833.784.338	0,00	0	100,00%	1.849.527.200	3,33%	191.736.500	70,83 %	1.288.675.200			74,17 %	1.480.411.700	13,33 %	1.480.411.700	13,33 %	8,79%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.0 2.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	25	1.862.628.750	0	0	4	154.961.000	0	0	3	86.521.800			3	86.521.800	3	86.521.800	12,00 %	4,65%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	150	14.971.155.588	0	0	30	1.694.566.200	2	191.736.500	20	1.202.153.400			22	1.393.889.900	22	1.393.889.900	14,67 %	9,31%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran	100,00%	4.315.378.752	0,00	0	100,00%	671.519.000	0,00%	0	24,18 %	168.692.800			24,18 %	168.692.800	4,84%	168.692.800	4,84%	3,91%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.0 2.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	50	276.281.563	0	0	10	37.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	50	276.281.563	0	0	10	37.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	55	1.381.407.813	0	0	11	201.400.000	0	0	10	131.492.800			10	131.492.800	10	131.492.800	18,18 %	9,52%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	55	1.381.407.813	0	0	11	201.400.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	50	1.000.000.000	0	0	10	194.719.000	0	0	3	37.200.000			3	37.200.000	3	37.200.000	6,00%	3,72%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pengawasan	100,00%	6.517.909.704	0,00	0	100,00%	621.180.000	25,83%	188.242.600	20,00 %	220.649.500			45,83 %	408.892.100	9,27%	408.892.100	9,27%	6,27%	SEKRETARIAT DPRD	

				Penyelenggaraan Pemerintah																					
		4.02.0 2.2.03. 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	75	1.140.154.930	0	0	15	123.500.000	5	68.556.000	3	37.887.500				8	106.443.500	8	106.443.500	10,67 %	9,34%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.03. 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	70	1.154.580.650	0	0	15	114.800.000	7	81.961.000	2	24.257.500				9	106.218.500	9	106.218.500	12,86 %	9,20%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.03. 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	75	1.104.849.969	0	0	15	125.200.000	2	12.976.500	1	5.047.500				3	18.024.000	3	18.024.000	4,00%	1,63%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.03. 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	75	1.154.580.650	0	0	15	78.700.000	5	18.663.000	1	21.730.000				6	40.393.000	6	40.393.000	8,00%	3,50%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.03. 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	75	1.039.750.000	0	0	15	79.200.000	0	1.536.800	5	64.123.500				5	65.660.300	5	65.660.300	6,67%	6,32%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.03. 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	25	799.134.667	0	0	5	85.000.000	2	3.794.300	2	57.860.500				4	61.654.800	4	61.654.800	16,00 %	7,72%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.03. 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	25	47.500.000	0	0	5	2.680.000	2	755.000	0	0				2	755.000	2	755.000	8,00%	1,59%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai

		4.02.0 2.2.03. 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	25	77.358.838	0	0	5	12.100.000	0	0	2	9.743.000				2	9.743.000	2	9.743.000	8,00%	12,59 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Peningkatan Kapasitas DPRD	100,00%	10.836.822.500	0,00	0	100,00%	1.766.564.500	22,28%	320.619.000	41,43 %	540.609.030				63,70 %	861.228.030	12,74 %	861.228.030	12,74 %	7,95%	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.0 2.2.04. 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman TugasDPRD (Dokumen)	390	7.733.762.500	0	0	78	1.031.752.500	50	293.619.000	0	158.299.030				50	451.918.030	50	451.918.030	12,82 %	5,84%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.04. 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan DokumentasiDewan (Dokumen)	300	1.320.000.000	0	0	60	461.000.000	0	0	33	251.000.000				33	251.000.000	33	251.000.000	11,00 %	19,02 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.04. 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan TimAhli (Orang)	105	853.060.000	0	0	21	93.812.000	0	0	18	80.010.000				18	80.010.000	18	80.010.000	17,14 %	9,38%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.04. 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	300	930.000.000	0	0	60	180.000.000	15	27.000.000	15	51.300.000				30	78.300.000	30	78.300.000	10,00 %	8,42%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100,00%	12.584.545.000	0,00	0	100,00%	2.486.909.000	32,00%	800.242.500	31,33 %	820.708.500				63,33 %	1.620.951.000	12,67 %	1.620.951.000	12,67 %	12,88 %	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.0 2.2.05. 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	375	1.859.545.000	0	0	75	341.909.000	23	86.082.500	22	106.416.500				45	192.499.000	45	192.499.000	12,00 %	10,35 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.05. 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	375	10.725.000.000	0	0	75	2.145.000.000	25	714.160.000	25	714.292.000				50	1.428.452.000	50	1.428.452.000	13,33 %	13,32 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
		4.02.0 2.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pelaksanaan dan pengawasan kode Etik DPRD	100,00%	425.000.000	0,00	0	100,00%	70.995.000	0,00%	0	0,00%	0				0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	

		4.02.0 2.2.06. 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode EtikDPRD (Laporan)	25	425.000.000	0	0	5	70.995.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai	
		4.02.0 2.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Fasilitasi Tugas DPRD	100,00%	22.451.140.724	0,00	0	100,00%	4.849.399.100	36,89%	2.179.299.960	19,05 %	2.142.233.192			55,94 %	4.321.533.152	10,37 %	4.321.533.152	10,37 %	19,25 %	SEKRETARIAT DPRD		
		4.02.0 2.2.08. 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan TugasDPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danKonsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	183	16.727.217.322	0	0	33	3.064.499.100	22	#####	5	1.339.599.392			27	2.798.144.552	27	2.798.144.552	14,75 %	16,73 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai	
		4.02.0 2.2.08. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PelaksanaanTugas Badan Musyawarah (Dokumen)	50	742.600.000	0	0	10	127.635.000	1	2.633.400	2	106.949.600			3	109.583.000	3	109.583.000	6,00%	14,76 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai	
		4.02.0 2.2.08. 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi TugasPimpinan DPRD (Dokumen)	270	4.981.323.402	0	0	50	1.657.265.000	17	718.121.400	11	695.684.200			28	1.413.805.600	28	1.413.805.600	10,37 %	28,38 %	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai	
Total Target (RP)									28.988.246.117		Total Realisasi (RP)							16.913.770.645							
Rata-rata capaian kinerja (%)															55,13	58,35									
Predikat kinerja															R	R									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Berdasarkan table diatas dapat dikemukakan bahwa kinerja rata-rata sub kegiatan/kegiatan Sekretariat DPRD hingga Triwulan kedua TA 2023 mencapai 55,13% dan berjalan sesuai yang ditargetkan dengan 8 sub kegiatan telah tercapai 100%, adapun kinerja yang belum terealisasi karena telah disesuaikan untuk dilaksanakan pada triwulan ketiga dan keempat.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan tercapainya target kinerja pada triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ke tiga dalam mendukung pelaksanaan tiga fungsi DPRD (fungsi Anggaran,Pengawasan dan Legislasi)
- b. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD khususnya dalam hal penguasaan teknologi dan informasi selaras dengan semakin tingginya kebutuhan terkait perkembangan teknologi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD dibantu oleh pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala Bagian, dan eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian, dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “Sektetariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD”. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD diukur mengacu pada indikator kinerja dari sasaran yang terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja beserta target sasaran dan program DPRD tertuang dalam perjanjian kinerja sekretariat TA 2022, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan tujuan organisasi. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan target dengan realisasi.

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan
Renstra Tahun 2021-2026 Kab. Kepulauan Selayar

No	IKU	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip SKPD			B	B(60)	B(65)	BB(70)	CC (58,33)	N/A	B(65)	BB(70)	
2	Laporan Keuangan yang sesuai SAP			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	N/A	Sesuai	Sesuai	
4	Indeks Kepuasan DPRD			85	65	70	75	88	N/A	70	75	
5	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu			100%	100%	100%	100%	98%	N/A	100%	100%	

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dan LAKIP Sekretariat
DPRD TA 2022

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Setelah Perubahan
Renstra Tahun 2021-2026 Kab. Kepulauan Selayar

No	IKU	SPM	IKK	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	-	-	B(60)	B (61,35)	N/A	Tercapai
2	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	-	-	Sesuai	Sesuai	N/A	Tercapai
4	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	-	-	65	N/A	N/A	Tercapai
5	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	-	-	100%	100%	N/A	Tercapai

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dan LAKIP
Sekretariat DPRD TA 2022

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya perlu untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab administratif kepada Kepala Daerah dan tanggung jawab operasional kepada Anggota DPRD. Sebagai lembaga birokrasi, Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dituntut untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus memiliki mentalitas kuat dan kemampuan untuk mengakomodir kepentingan dalam mendukung kinerja DPRD. Pada proses pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sehingga diperlukan kemampuan untuk mengenali serta merespon isu-isu penting dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
2. Benturan kepentingan yang seringkali terjadi menuntut mentalitas yang kuat dalam mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak;
3. Kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin kerja aparat masih rendah, terdapat beberapa aparat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya dan memberikan beban kerja kepada pihak lain;

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Menjalin komunikasi intensif dan baik diantara partai, dengan fraksi-fraksi yang ada dan pada semua pihak yang terkait terkait berbagai regulasi atau kebijakan yang akan ataupun sedang berjalan;
3. Memenuhi kebutuhan formasi Sumber Daya Aparatur yang kurang.

Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sangatlah berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menurut Analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kelemahan (Weakness):

- a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia

Peluang (Opportunity) :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.
- d. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

Tantangan (Threat):

- a. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- b. Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah rekomendasi isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yakni :

1. Mengoptimalkan sistem pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;
2. Merekomendasikan kepada BKD agar menempatkan pegawai ASN di lingkup Sekretariat DPRD sesuai dengan bidang pendidikan .
3. Memberdayakan tenaga pelayanan dan menyediakan tenaga teknis di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan Bimtek Legal Drafting/Diklat-Diklat;
4. Mewujudkan prasarana dan sarana kerja yang dibutuhkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (lengkap dengan fasilitas dan referensi-referensi atau bahan penyusunan).

BAB III

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ikut dalam melaksanakan Misi yaitu : **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”** dengan tujuan RPJMD **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah”**.

Dari rumusan RPJMD kemudian ditetapkan dalam Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, tujuan Sekretariat DPRD yang ingin dicapai yakni **“Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD”**.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja perubahan mengacu pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 adalah:

- 1. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat Daerah**
- 2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan**

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja perubahan sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Dengan tujuan tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan dapat memberikan fasilitasi terhadap optimalisasi Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam implementasi Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum

yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Pada Renja perubahan Sekretariat DPRD TA 2023 ini merumuskan adanya reconfusing kegiatan dan realokasi anggaran. Recofusing kegiatan yang dimaksudkan adalah sub kegiatan yang semula ada pada renja Sekretariat DPRD TA 2023 kemudian dihilangkan pada Renja Perubahan Sekretariat DPRD TA 2023 dan begitupun sebaliknya karena adanya kebutuhan yang harus difasilitasi mengikuti aturan terbaru serta adanya kegiatan yang tidak relevan untuk dilaksanakan. Berikut daftar reconfusing kegiatan yang direncanakan pada Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD TA 2023:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bertambah), karena sebelum anggaran pokok TA 2023 belum ada Anggota DPRD yang berkenan untuk menempati rumah dinas sehingga tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya. Kemudian pada TA 2023 berjalan, terjadi perubahan kebutuhan karena disediakan rumah dinas untuk Ketua DPRD Kab. Kep. Selayar sehingga diperlukan peralatan rumah tangga untuk menunjang dan memberikan fasilitas pelengkap rumah dinas.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bertambah), karena adanya kebutuhan terkait bahan logistik kantor berupa plakat yang akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Layanan Administrasi DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Bertambah), untuk memberikan fasilitasi dalam rapat DPRD.
- Fasilitasi Fraksi DPRD (dihilangkan), dengan perkiraan belanja berupa bahan cetak, bahan komputer dan belanja makanan dan minuman rapat dengan kinerja 12 Laporan. Fasilitasi fraksi DPRD dihilangkan karena mempertimbangkan fasilitasi fraksi DPRD dapat diefisiensikan dengan rapat lainnya sehingga anggaran difokuskan kembali untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan.

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Bertambah), adanya perubahan kebutuhan karena disediakan rumah dinas untuk Ketua DPRD Kab. Kep. Selayar sehingga diperlukan peralatan rumah tangga untuk menunjang dan memberikan fasilitas pelengkap rumah dinas.

Kemudian realokasi anggaran dilakukan agar anggaran dapat dipergunakan secara efektif dalam mengakomodir layanan administrasi maupun fasilitasi dalam menunjang tugas anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar , daftar rencana realokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
								Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan			
1	2	3	4	5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					28,988,246,117	31,805,206,251			33,502,045,172
4					SEKRETARIAT DPRD									
4	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja (Penunjang)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng			16,672,152,317	16,510,149,951	DANA ALOKASI UMUM	100 %	20,112,387,472
4	0 2	0 1	2,0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				174,343,000	196,463,000			187,343,000
1	1	1	2,0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	5 Dokumen	5 Dokumen	47,244,000	79,364,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	57.244.000
4	0	0	2	02	Koordinasi dan	JumlahDokumen RKA-SKPD	Kab.			11,000,000	11,000,000	DANA	1	

	2	1	.01		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen			ALOKASI UMUM (DAU)		Dokumen	14.000.000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	11,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	11.000.000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	8,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	8.000.000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	8,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	8.000.000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	6 Laporan	6 Laporan	58,587,000	48,587,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	58.587.000
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar,	1 Laporan	1 Laporan	30,512,000	30,512,000	DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	30.512.000

							Benteng,Be nteng					(DAU)			
4	0 2	0 1	2 .02		AdministrasiKeuanganP erangkat Daerah	PersentaseDokumen/Lapora nPengelolaanKeuangan yang di selesaikantepatwaktu				2,107,406,452	2,309,366,586			100 %	
4	0 2	0 1	2 .02	01	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	26 Orang/Bulan	27 Orang/Bul an	2,020,804,452	2,202,764,586	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27 Orang /Bulan	2.020.804.452
4	0 2	0 1	2 .02	02	PenyediaanAdminisrtasiPe laksanaan Tugas ASN	JumlahDokumen Hasil PenyediaanAdministrasiPelaks anaan Tugas ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	5.000.000
4	0 2	0 1	2 .02	03	PelaksanaanPenatausaha an dan Pengujian/VerifikasiKeuan gan SKPD	JumlahDokumenPenatausaha an dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	12Dokumen	12 Dokumen	23,000,000	28,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	25.000.000
4	0 2	0 1	2 .02	04	Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	JumlahDokumenKoordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	12 Dokumen	12 Dokumen	20,090,000	25,090,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	30.000.000
4	0	0	2	05	Koordinasi dan	JumlahLaporanKeuangan	Kab.	1 Laporan	1 Laporan	8,660,000	8,660,000	DANA		1	12.000.000

	2	1	.02		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng					ALOKASI UMUM (DAU)		Laporan	
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	16,998,000	16,998,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	16.998.000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Laporan	12 Laporan	12,854,000	22,854,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	18.000.000
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu				14,910,000	15,910,000			100 %	14,410,100
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar,	2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	3.000.700

							Benteng,Be nteng					(DAU)			
4	0 2	0 1	2 .03	05	Rekonsiliasi dan penyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	12 Laporan	12 Laporan	6,410,000	6,410,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	6.409.400
4	0 2	0 1	2 .03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	6,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	5.000.000
4	0 2	0 1	2 .05		AdministrasiKpegawaia nPerangkat Daerah	Persentase ASN Yang Memiliki Predikat Kinerja Sangat Baik				360,000,000	421,000,000			100 %	476,600,000
4	0 2	0 1	2 .05	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng					DANA ALOKASI UMUM (DAU)		27 Paket	21,600,000
4	0 2	0 1	2 .05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	5,000,000
4	0	0	2.0	00	BimbinganTekhnisImplem	Jumlah Orang yang Mengikuti	Kab.	29 Laporan	29	350,000,000	411,000,000	DANA		29 Orang	450.000.000

	2	1	5	11	entasiPeraturanPerundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng		Laporan				ALOKASI UMUM (DAU)			
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				636,921,000	1,018,719,000			100 %		711,936,200
4	02	01	2.06	01	PenyediaanKomponeninstalasi listrik / peneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	20 Paket	20 Paket	15,310,000	15,310,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Paket		15.310.000
					PenyediaanPeralatan Rumah Tangga			1 Paket	1 Paket	5,000,000	171,372,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0	55,040,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200 Paket		75.013.600
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	40 Paket	40 Paket	34,000,000	49,484,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40 Paket		34.000.400

4	0	0	2	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	12 Laporan	12 Laporan	35,190,000	46,180,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12 Laporan	35.190.200
4	0	0	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	36 Laporan	36 Laporan	552,421,000	681,333,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	36 Laporan	552.422.000
4	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah				92,674,000	113,678,000		100 %	85.095.000
4	0	0	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	1 Unit	1 Unit	92,674,000	113,678,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1 Unit	85.095.000
4	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				592,801,000	653,418,000			592,801,000
4	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar,	12 Laporan	12 Laporan	11,400,000	11,132,000	DANA ALOKASI UMUM	12 Laporan	11.400.000

							Benteng,Be nteng					(DAU)			
4	0 2	0 1	2 .08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	12 Laporan	12 Laporan	304,578,000	284,463,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	304.578.000
4	0 2	0 1	2 .08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	12 laporan	12 laporan	276,823,000	357,823,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	276.823.000
4	0 2	0 1	2 .09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik				651,283,000	925,257,000				513,739,300
4	0 2	0 1	2 .09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	4 Unit	4 Unit	183,264,000	183,264,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	183.264.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	JumlahKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang di pelihara dan dibayarkanpajakperizinannya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be	36 Unit	36 Unit	82,022,000	121,152,000			36 Unit	82.000.200

					Dinas Operasional atau Lapangan		nteng								
4	0	0	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	30 Unit	30 Unit	22,930,000	31,940,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Unit	22.930.800
4	0	0	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	6 Unit	6 Unit	363,067,000	588,901,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	225.544.300
4	0	0	2		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng			12,006,820,865	10,557,828,365			100 %	14,201,667,420
4	0	0	2	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	11,872,968,865	10,405,976,365	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang/Bulan	12.592.677.270
4	0	0	2	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	100 Paket	100 Paket	133,852,000	151,852,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Paket	1.078.030.000

					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase Keterpenuhan layanan keuangan & kesejahteraan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng					DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Orang	530.960.150
4	0	0	2		Layanan Administrasi DPRD					34,993,000	298,510,000			100 %	1.200.993.000
				01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	12 Dokumen	12 Dokumen	0	35,500,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	50.000.000
4	0	0	2	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	60 Orang	60 Orang	16,983,000	0	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	16.983.000
4	0	0	2	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	6 Laporan	6 Laporan	18,010,000	23,010,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Laporan	18.010.000
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					5,000,000	240,000,000	DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	1.116.000.000

4	0	0			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD						(DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 %	13,389,657,700
4	0	0	2		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pembahasan Perda	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng			1,849,527,200	3,651,080,200		100 %	1,849,527,200
4	0	0	2	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	5 Dokumen	5 Dokumen	154,961,000	220,443,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	5 Dokumen	154.961.000
4	0	0	2	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	30 Dokumen	30 Dokumen	1,694,566,200	3,395,077,200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	30 Dokumen	1.694.566.200
4	0	0	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran				671,519,000	686,683,000		100 %	671,519,000
4	0	0	2	01	Pembahasan KUA dan	Jumlah Dokumen Hasil	Kab.	10 Dokumen	10	37,000,000	37,000,000	DANA	10	37.000.000

	2	2	.02		PPAS	Pembahasan KUA danPPAS	Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng		Dokumen			ALOKASI UMUM (DAU)		Dokumen	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PerubahanKUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	10 Dokumen	10 Dokumen	37,000,000	25,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	37.000.000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	11 Dokumen	11 Dokumen	201,400,000	208,400,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Dokumen	201.400.000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBDPerubahan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	11 Dokumen	11 Dokumen	201,400,000	193,982,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Dokumen	201.400.000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil PembahasanPertanggungjawa ban APBD (Dokumen)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	10 Dokumen	10 Dokumen	194,719,000	222,301,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	194.719.000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah				621,180,000	839,925,000			100 %	621,199,000

4	0	0	2	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	15 Laporan	15 Laporan	123,500,000	189,900,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	123.503.200
4	0	0	2	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	15 Laporan	15 Laporan	114,800,000	182,200,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	114.806.900
4	0	0	2	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	15 Laporan	15 Laporan	125,200,000	198,600,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	125.199.500
4	0	0	2	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	15 Laporan	15 Laporan	78,700,000	81,245,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	78.699.600
4	0	0	2	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Be nteng	15 Laporan	15 Laporan	79,200,000	82,200,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	79.199.900
4	0	0	2	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut	Kab. Kepulauan	5 Dokumen	5 Dokumen	85,000,000	88,000,000	DANA ALOKASI		5 Dokumen	85.009.400

					Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Selayar, Benteng, Benteng					UMUM (DAU)			
4	0	0	2	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dokumen	5 Dokumen	2,680,000	2,680,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	2.670.000
4	0	0	2	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dokumen	5 Dokumen	12,100,000	15,100,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	12.110.500
4	0	0	2	00	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Peningkatan Kapasitas DPRD				1,766,564,500	1,570,258,000			100 %	2,640,116,300
				01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD								25 Dokumen	504.674.200
4	0	0	2	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	128 Dokumen	128 Dokumen	1,031,752,500	860,442,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		78 Dokumen	1.540.130.100

4	0	0	2	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Dokumen	60 Dokumen	461,000,000	440,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			264.000.000
4	0	0	2	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	21 Orang/Perda	21 Orang/Perda	93,812,000	141,308,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Orang	151.312.000
4	0	0	2	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Orang	60 Orang	180,000,000	180,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Orang	180.000.000
4	0	0	2		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat				2,486,909,000	2,440,909,000			100 %	2.486.910.000,00
4	0	0	2	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	75 Laporan	75 Laporan	341,909,000	306,909,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75 Laporan	341.910.000
4	0	0	2	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil	Kab.	75 Dokumen	75	2,145,000,000	2,145,000,000	DANA		75	2.145.000.000

	2	2	.05			Pelaksanaan Reses	Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng		Dokumen			ALOKASI UMUM (DAU)		Dokumen	
4	0 2	0 2	2 .06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Pelaksanaan dan pengawasan kode Etik DPRD				70,995,000	94,250,000			100 %	70.996.200
4	0 2	0 2	2 .06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode EtikDPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	5 Laporan	5 Laporan	70,995,000	94,250,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	70.996.200
4	0 2	0 2	2 .08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan dalam Fasilitasi Tugas DPRD				4,849,399,100	6,011,951,100			100 %	5.049.390.000
4	0 2	0 2	2 .08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danKonsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	30 Dokumen	30 Dokumen	3,064,499,100	3,715,154,100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		33 Dokumen	3.164.490.000
4	0 2	0 2	2 .08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PelaksanaanTugas	Kab. Kepulauan	1 Laporan	1 Laporan	127,635,000	121,635,000	DANA ALOKASI		10 Dokumen	127.635.000

					Musyawarah	Badan Musyawarah	Selayar, Benteng,Be nteng					UMUM (DAU)			
4	0	0	2	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi TugasPimpinan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng,Be nteng	50 Dokumen	50 Dokumen	1,657,265,000	2,178,162,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Dokumen	1.757.265.000
TOTAL											31,805,206,251				33,502,045,172

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 2023

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi/organisasi dalam hal ini adalah Instansi Pemerintah untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pada tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan 2 program dan 17 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Dalam merumuskan Program dan kegiatan tersebut terdapat beberapa pertimbangan pencapaian visi misi kepala daerah, dan peraturan perundang undangan yang setiap saat berubah.

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** terdiri dari 10 kegiatan, meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - j. Layanan Administrasi DPRD
- **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DPRD** terdiri dari 7 kegiatan meliputi :

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD

Total Pagu Indikatif Pokok TA 2023 sebesar Rp. 28.988.246.117 kemudian dapat dilihat pada Tabel 3.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023 terdapat beberapa sub kegiatan yang direncanakan mengalami refofusing kegiatan dan realokasi anggaran karena adanya beberapa kinerja yang membutuhkan penambahan anggaran dengan total pagu indikatif perubahan sebesar Rp. 31.805.206.251, yang semuanya bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi pada saat Rencana Kerja dilaksanakan, dan sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kep. Selayar. Rumusan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar terdiri dari 2 program dan 17 kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif Pokok sebesar Rp. 28.988.246.117 dan pagu indikatif perubahan sebesar Rp. 31.805.206.251 . Dalam satu tahun pelaksanaan Rencana Kerja TA 2023 akan terus dilakukan penyesuaian atas berbagai perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan tujuan sasaran dan tupoksi Sekretariat DPRD.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Pengadaan sarana prasarana fasilitasi Anggota Dewan DPRD Kab.Kep Selayar;
3. Penambahan kuantitas dan kualitas aparatur yang sesuai dengan bidang tugas

Demikian Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2023.

Demikian untuk dilaksanakan.

Benteng, 2 Agustus 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



MASDAR J PRATAMA, S.Kom

Pangkat : Pembina Tingkat 1

NIP. 198406022010011012

